



BAGIAN ANGGARAN 032

LAPORAN KEUANGAN

(AUDITED)

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Swasembada Timur XIII No. 64, Tanjung Priok - Jakarta Utara
Telp.(021) 43910470,4371604, 43903634,Fax. (021) 43903634
bppmhkp.jakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan *Audited* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 30 April 2026
Pit. Kepala

Dedi Supardi, S.St.Pi
NIP. 19810509 200502 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	iv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	16
C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA	21
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	26
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	31
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	35
LAMPIRAN	37

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas **Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 30 April 2026
Plt. Kepala

Dedi Supardi, S.St.Pi
NIP. 19810509 200502 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp3,314,012,248** atau mencapai **38,94 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp8,510,000,000,-**. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp7,818,896,088,-** atau mencapai **87,59 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp8,926,450,000,-**.

Realisasi Belanja Negara pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp7,956,986,508,-** atau mencapai **90,92 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp8,751,993,000,-**. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp10,006,904,556,-** atau mencapai **93,67 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp10,683,142,000,-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset Per **31 Desember 2025** dicatat dan disajikan sebesar **Rp15,614,202,894,-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp262,976,983,-** ; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp.0 ; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp15,351,225,911,-** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp22,339,198,-** dan **Rp15,591,863,696,-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp3,312,861,000,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp8,801,688,766,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp(5,488,827,766),-**, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp(5,510,206,227),-** dan **Rp0,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(5,510,206,227),-**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp16,301,036,505,-** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(5,510,206,227),-** kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp.0** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp4,846,375,260,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp15,591,863,696,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Anggaran	31 Des 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.II.4	8,510,000,000	3,314,012,248	38,94	7,818,896,088
JUMLAH PENDAPATAN		8,510,000,000	3,314,012,248	38,94	7,818,896,088
B. BELANJA					
Belanja Pegawai	B.I.1	3,898,420,000	3,520,297,898	90,30	3,472,236,149
Belanja Barang	B.I.2	4,853,573,000	4,436,688,610	91,41	4,992,395,246
Belanja Modal	B.I.3	-	-	-	1,542,273,161
JUMLAH BELANJA		8,510,000,000	7,956,986,508	90,92	10,006,904,556

II. NERACA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II N E R A C A UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Tabel 2 Neraca

		<i>(Dalam rupiah)</i>	
URAIAN	CATATAN	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	262,976,983	516,354,792
JUMLAH ASET LANCAR		262,976,983	516,354,792
ASET TETAP			
Tanah	C.2	10,118,066,000	10,118,066,000
Peralatan dan Mesin	C.3	12,593,400,877	12,756,545,248
Gedung dan Bangunan	C.4	5,482,469,374	5,361,406,003
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	18,675,000	18,675,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.6	(12,861,385,340)	(12,446,291,811)
JUMLAH ASET TETAP		15,351,225,911	15,808,400,440
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.7	746,600,000	349,800,000
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI ASET LAINNYA	C.8	(746,600,000)	(349,800,000)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		15,614,202,894	16,324,755,232
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.9	22,339,198	23,718,727
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		22,339,198	23,718,727
JUMLAH KEWAJIBAN		22,339,198	23,718,727
EKUITAS			
Ekuitas	C.10	15,591,863,696	16,301,036,505
JUMLAH EKUITAS		15,591,863,696	16,301,036,505
JUMLAH EKUITAS		15,591,863,696	16,301,036,505
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15,614,202,894	16,324,755,232

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

Tabel 3 Laporan Operasional

		<i>(Dalam rupiah)</i>	
URAIAN	CATATAN	31 Des 2025	31 Des 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3,312,861,000	7,812,534,054
JUMLAH PENDAPATAN		3,312,861,000	7,812,534,054
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,520,297,898	3,472,236,149
Beban Persediaan	D.3	432,843,442	880,523,050
Beban Barang dan Jasa	D.4	3,251,204,775	2,896,957,920
Beban Pemeliharaan	D.5	1,131,607,287	564,895,413
Beban Perjalanan Dinas	D.6	53,902,677	642,968,874
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	411,832,687	797,631,543
JUMLAH BEBAN		8,801,688,766	9,255,212,949
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,488,827,766)	(1,442,678,895)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	(21,378,461)	4,362,034
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	1,151,248	4,362,034
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	22,529,709	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(21,378,461)	4,362,034
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,510,206,227)	(1,438,316,861)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5,510,206,227)	(1,438,316,861)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas

<i>(Dalam rupiah)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	16,301,036,505	21,911,600,963
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,510,206,227)	(1,438,316,861)
KOREKSI YANG			
MENAMBAH/MENGURANGI	E.3	(45,341,842)	(9,402,500)
EKUITAS			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4	(45,341,842)	(9,402,500)
LAIN-LAIN	E.5	-	10,000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	4,846,375,260	(4,162,845,097)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(709,172,809)	(5,610,564,458)
EKUITAS AKHIR		16,301,036,505	16,301,036,505

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar
Hukum
entitas dan
rencana
strategis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Swasembada Timur XIII No.64 Tanjung Priok dan Jl. Enggano Raya No.16 Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia. Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II berkomitmen dengan :

VISI:

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang kompeten dan profesional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
9. Terkelolanya anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II secara optimal.

*Pendekatan
penyusunan
laporan
keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai KIPM Jakarta II menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Kantor Balai Kipm Jakarta II dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standard Akutansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akutansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari *Satker* Balai KIPM Jakarta II Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan - kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Satker*. Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut :

*Pendapatan
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KasUmum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akutansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK No.65/PMK.06/2017 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KMK.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut :

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
akuntansi
berbasis
akrual
pertama
kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2024 yang berbasis *cash to ward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2024 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Kantor Balai KIPM Jakarta II** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah, penambahan dana APBNP dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	8,510,000,000	8,510,000,000
Jumlah Pendapatan	8,510,000,000	8,510,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,898,420,000	3,898,420,000
Belanja Barang	4,853,573,000	4,853,573,000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	8,751,993,000	8,751,993,000

Realisasi

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp3,314,012,248,

-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada **31 Desember 2025** adalah sebesar **Rp3,314,012,248** atau mencapai **38,94 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp8,510,000,000,-**. Keseluruhan Pendapatan Kantor Balai KIPM Jakarta II terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	8,510,000,000	3,312,861,000	38,94
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	740,248	-
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	411,000	-
Jumlah	8,510,000,000	3,314,012,248	38,94

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 59,38 persen dibanding tahun sebelumnya Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp3,312,861,000,-.
2. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp740,248,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa kelebihan tunjangan fungsional/umum bulan oktober 2024 sampai Januari 2025.
3. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp411,000. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa perjalanan dinas.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA.2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 DES 2025	REALISASI 30 DES 2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3,312,861,000	7,808,980,000	(57,58)
2. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	900,000	(100)
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2,654,054	(100)
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	740,248	2,185,134	(66,12)
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	411,000	4,176,900	(90,16)
Jumlah Pendapatan	3,314,012,248	7,818,896,088	(57,62)

Realisasi Belanja
Negara
Rp7,956,986,508,-

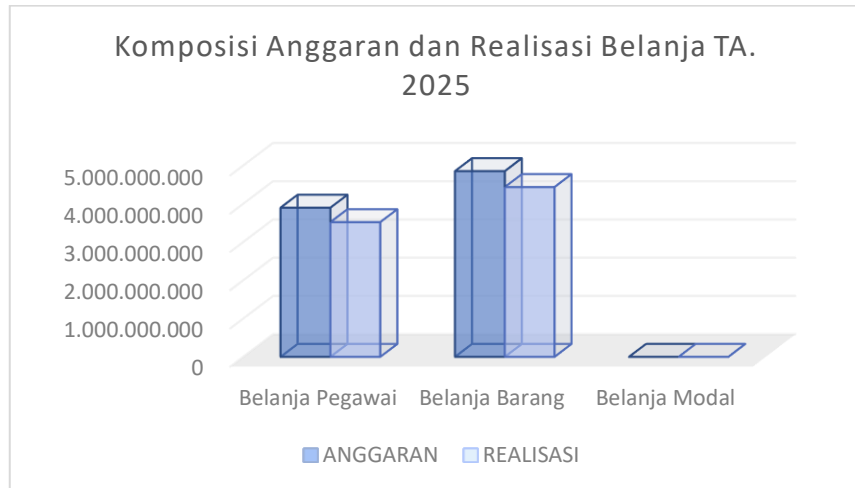
B.2. Belanja

Realisasi Belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II pada **TA.2025** adalah sebesar **Rp7,956,986,508,-** atau sebesar **90,92 persen** dari anggaran belanja sebesar **Rp8,751,993,000,-**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2025

URAIAN	31 Desember 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,898,420,000	3,520,297,898	90,30
Belanja Barang	4,853,573,000	4,436,688,610	91,41
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	8,751,993,000	7,956,986,508	90,92
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	8,751,993,000	7,956,986,508	90,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



Bagan 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025

Dibandingkan dengan TA.2024, Realisasi Belanja Periode TA.2025 mengalami penurunan sebesar 20,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,520,297,898	3,472,236,149	1,38
Belanja Barang	4,436,688,610	4,992,395,246	(11,13)
Belanja Modal	0	1,542,273,161	(100,00)
Jumlah Belanja	7,956,986,508	10,006,904,556	(20,49)

Belanja Pegawai
Rp3,520,297,898,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai **TA.2025** dan **TA.2024** adalah masing-masing sebesar **Rp3,520,297,898,-** dan **Rp3,472,236,149,-**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA.2025 dengan TA.2024 mengalami kenaikan sebesar **1,38%** disebabkan ada penambahan gaji PPPK.

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,171,886,913	3,460,970,682	(8,35)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	326,588,985	-	-
Belanja Lembur	21,822,000	11,266,000	93,70
Jumlah Belanja Kotor	3,520,297,898	3,472,236,682	1,38
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(533)	(100)
Jumlah Belanja Bersih	3,520,297,898	3,472,236,149	1,38

Belanja Barang
Rp4,436,688,610,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per **TA.2025** dan **TA.2024** adalah masing-masing sebesar **Rp4,436,688,610,-** dan **Rp4,992,395,246,-**. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 11,13% dari Realisasi TA 2024.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,382,132,370	1,244,088,043	11,10
Belanja Barang Non Operasional	446,737,420	220,400,630	102,69
Belanja Barang Persediaan	2,997,000	872,682,950	(99,66)
Belanja Jasa	1,423,714,514	1,447,538,336	(1,65)
Belanja Pemeliharaan	1,127,204,629	564,716,413	99,61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	53,902,677	643,388,874	(91,62)
Jumlah Belanja Kotor	4,436,688,610	4,992,815,246	(11,14)
Pengembalian Belanja	-	420,000	(100,00)
Jumlah Belanja Bersih	4,436,688,610	4,992,395,246	(11,13)

Belanja Modal
Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA.2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp1,542,273,161,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1,074,452,000	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	467,821,161	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1,542,273,161	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	1,542,273,161	-

C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

Persediaan

Rp262,976,983,-

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp262,976,983,-** dan **Rp516,354,792,-**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan TA.2025 dan 2024

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	101,044,581	152,268,444
Bahan Baku	161,932,402	359,683,690
Jumlah	262,976,983	516,354,792

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp10,118,066,000,-

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Jakarta II per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp10,118,066,000,-** dan **Rp10,118,066,000,-**. Mutasi tambah nilai tanah tersebut karena adanya koreksi pencatatan nilai oleh KPKNL dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	10,118,066,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	10,118,066,000

Tabel 17 Rincian Tanah

Luas	Lokasi	Nilai
780 m2	Jl. Swasembada Timur XIII No.64, Tanjung Priok	10,118,066,000
Jumlah		10,118,066,000

Peralatan dan Mesin

Rp12,593,400,877,-

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp12,593,400,877,-** dan **Rp12,756,545,248,-**. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	12,756,545,248
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	12,593,400,877
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11,766,775,843)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	826,625,034

Gedung dan
Bangunan
Rp5,482,469,374,-

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp5,482,469,374,-** dan **Rp5,361,406,003,-**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5,361,406,003
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	5,482,469,374
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	889,502,218
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4,592,967,156

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp18,675,000,-

C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp18,675,000,-** dan **Rp18,675,000,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	18,675,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	18,675,000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	11,001,668
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7,673,332

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(12,861,385,340),
-

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing **Rp(12,861,385,340),-** dan **Rp(12,446,291,811),-**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	12,593,400,877	11,766,775,843	826,625,034
Gedung dan Bangunan	5,482,469,374	889,502,218	4,592,967,156
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,675,000	11,001,668	7,673,332
Akumulasi Penyusutan	18,094,545,251	12,667,279,729	5,427,265,522

Aset Tak Berwujud
Rp746,600,000,-

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp746,600,000,-** dan **Rp349,800,000,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud Balai KIPM Jakarta II berupa software. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	349,800,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	746,600,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-746,600,000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Tabel 23 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software	746,600,000
Jumlah	746,600,000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp746,600,000,-

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing **Rp746,600,000,-** dan **Rp349,800,000,-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	746,600,000	746,600,000	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	746,600,000	746,600,000	-

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp22,339,198-

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp22,339,198,-** dan **Rp23,718,727,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja barang yang masih harus dibayar	22,339,198	Listrik Swasembada dan Muara Baru Bulan Desember 2025 sebesar Rp18,683,288,- dan Telepon Swasembada dan Muara Baru Bulan Desember 2025 sebesar Rp3,655,910,-
Total	22,339,198	

Ekuitas

Rp15,591,863,696,-

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp15,591,863,696,-** dan **Rp16,301,036,505,-**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp3,312,236,000,

-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp3,312,861,000,-** dan **Rp7,812,534,054,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	3,312,861,000	6,654,220,000	(57,60)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	14,220,000	(100)
Jumlah	3,312,861,000	7,812,534,054	(57,67)

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya.

Selisih antara PNBP dalam LO dan LRA terdapat dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO, sebagai bentuk penyesuaian antara laporan berbasis akrual dan laporan berbasis kas. Pendapatan dari kegiatan Non Operasional senilai Rp1,151,248,- berupa pengembalian dari belanja tunjangan fungsional/umum senilai Rp740,248,- dan pengembalian belanja perjalanan dinas senilai Rp411,000,-.

Beban Pegawai

Rp3,520,297,898,

-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA.2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3,520,297,898,-** dan **Rp3,472,236,149,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Rincian Beban Pegawai TA. 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,198,115,125	1,258,429,096	(4,79)
Beban Tunjangan-Tunjangan	2,300,360,773	2,202,541,053	(4,44)
Beban Lembur	21,822,000	11,266,000	(93,70)
Jumlah	3,520,297,898	3,472,236,149	(1,38)

Beban Persediaan
Rp432,843,442,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp432,843,442,-** dan **Rp880,523,050,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 17,26 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Persediaan TA. 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	192,603,450	701,916,050	(73,97)
Beban Bahan Baku	240,239,992	178,607,000	34,51
Jumlah Beban Persediaan	432,843,442	880,523,050	(51,96)

Beban Barang
dan Jasa
Rp3,251,204,775,
-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3,228,865,577,-** dan **Rp2,896,957,920,-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,23 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan terjadi penurunan pagu atas belanja barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 29 Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,034,802,270	999,327,168	3,55
Beban Penambah Daya tahan tubuh		23,691,375	(100)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	125,500	54,500	130,28
Beban Honor Output Satuan Kerja	105,030,000	129,612,000	(18,97)
Beban Barang Operasional Lainnya	242,174,600	91,403,000	164,95
Beban Bahan	445,237,420	219,856,630	102,51
Beban Barang Non Operasional lainnya	1,500,000	-	-

Beban Honor Output Kegiatan	-	544,000	(100)
Beban Langganan Listrik	224,166,159	340,719,042	(39,69)
Beban Langganan Telepon	44,342,895	71,009,599	(42,70)
Beban Langganan Air	15,008,157	15,715,968	(4,50)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,500,000	1,800,000	205,56
Beban Sewa	46,737,556	41,781,182	11,86
Beban Jasa Profesi		17,650,000	(100)
Beban Jasa Lainnya	1,086,580,218	943,793,456	15,13
Jumlah	3,251,204,775	2,896,957,920	12,23

Beban

Pemeliharaan

Rp1,131,607,287,

-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1,131,607,287,-** dan **Rp564,895,413,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Pemeliharaan TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	744,542,777	159,791,451	365,95
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	382,661,852	404,924,962	(5,50)
Beban Pemeliharaan jaringan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	139,000	(100)
Beban Persediaan Suku Cadang	4,402,658	40,000	10906,65
Jumlah	1,131,607,287	564,895,413	100,32

Beban Perjalanan

Dinas

Rp53,902,677,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp53,902,677,-** dan **Rp642,968,874,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	44,632,677	402,498,984	(88,91)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,270,000	188,719,890	(95,09)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	51,750,000	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	53,902,677	642,968,874	(91,62)

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp411,832,687,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp411,832,687,-** dan **Rp797,631,543,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA.2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	147,739,062	607,404,860	(75,68)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69,712,972	184,666,612	(62,25)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	275,042	5,560,071	(95,05)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	411,832,687	797,631,543	(72,70)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	411,832,687	797,631,543	(72,70)

Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp(21,378,461).-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Kegiatan Non Operasional TA.2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK/ TURUN %
Surplus dari Kegiatan Operasional	-	-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan Pelepasan Aset	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset	-	-	-
Beban Pelepasan Aset	-	-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	(21,378,461)	4,362,034	(59,01)
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional	1,151,248	4,362,034	(73,61)
Beban dari kegiatan Non Operasional	22,529,709	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(21,378,461)	4,362,034	(59,01)

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Des 2025	31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp16,301,036,505,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp16,301,036,505,-** dan **Rp21,911,600,963,-**.

Defisit LO

Rp(5,510,206,227),

-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp(5,510,206,227),-** dan **Rp(1,438,316,861),-**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah /

Mengurangi Ekuitas

Rp(45,341,842),-

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp(45,341,842),-** dan **Rp(9,402,500),-**. Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai asset, koreksi nilai persediaan.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,-** dan **Rp0,-**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp0,-**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA.2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang dilakukan jika ditemukan kesalahan atau penilaian yang kurang tepat dalam reklasifikasi awal untuk melakukan pemindahan suatu akun. Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,-** dan **Rp0,-**.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp0,-**.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp(45,341,842),-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp(45,341,842),-** dan **Rp(9,412,500),-**. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut adalah koreksi nilai Peralatan dan Mesin yang merupakan perbedaan nilai buku akibat reklas keluar – reklas masuk mengakibatkan masa manfaat pada jenis barang.

Tabel 35 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Peralatan dan Mesin	(45,341,842)
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	(45,341,842)

Koreksi Lain-Lain
Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar **Rp0,-** dan **Rp10,000,-**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Beban	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp4,846,375,260,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp4,846,375,260,- dan Rp(4,162,845,097),-**. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,956,986,508
Diterima dari Entitas Lain	(3,314,012,248)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	203,401,000
Jumlah	4,846,375,260

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar **Rp7,956,986,508,-** sedangkan DKEL sebesar **Rp(3,314,012,248),-**.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- Sedangkan transfer masuk merupakan sertifikat HC dan pengadaan bahan lab sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp203,401,000,- terdiri dari :

Tabel 37 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Konsumsi	Sertifikat HC	160,912,296
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	Bahan Lab	42,488,704
Jumlah		203,401,000

Ekuitas Akhir

Rp15,591,863,696,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp15,591,863,696,- dan Rp16,301,036,505,-**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN - KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

Ada beberapa hal yang akan Balai KIPM Jakarta II ungkapkan, antara lain:

1. Utang kepada pihak ketiga senilai Rp22,339,198,- berupa tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2025 di Swasembada dan Muara Baru, dengan rincian Listrik Muara Baru Rp2,480,166,- ; Listrik Swasembada Rp16,203,122,- ; Telepon Muara Baru Rp70,388,- ; dan Telepon Swasembada Rp3,585,522,- .
2. Balai KIPM Jakarta II mendapatkan transfer masuk dari Sekretariat Badan berupa HC senilai Rp160,912,296,-. Persediaan bahan laboratorium senilai Rp42,488,704,-.
3. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp740,248,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa belanja tunjangan fungsional/umum.
4. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp411,000,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa belanja perjalanan dinas.

F.3. Pengungkapan Program Prioritas Nasional (PN) TA 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp803,660,000,- dan realisasi Rp626,392,920,- atau 77,94% ; dan masih terdapat kegiatan yang belum terlaksanakan, dikarenakan anggaran terkena blokir *automatic adjustment* (AA), dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA II TA. 2025**

Kode	Nama Keg	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
3989.PDC.002	Produk Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang di validasi	29.820.000	29,702,000	99,60	produk	3.250.000	2.980.000	99,60
3989.PDF.002	Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	110.420.000	10,400,000	9,42	lembaga	10.000	9.000	91,59
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	50.000.000	0	0	produk	10.000	10.000	100
3989.QIC.002	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20,000,000	0	0	lembaga	260.000	230.000	91,59
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang Terakreditasi di Laboratorium Acuan dan Penguji Sektor Kelautan dan Perikanan	551.420.000	551,310,920	99,98	Rekomendasi Kebijakan	10.000	10.000	100
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25,000,000	24,980,000	99,92	lembaga	10.000	10.000	100
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	10,000,000	10,000,000	100	lembaga	10.000	10.000	100
7010.QIA.001	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0	produk	10.000	10.000	100

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA 649682

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:04 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,510,000,000	3,314,012,248	(5,195,987,752)	39	8,926,450,000	7,818,896,088	1,107,553,912	88
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,510,000,000	3,314,012,248	(5,195,987,752)	39	8,926,450,000	7,818,896,088	1,107,553,912	88
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	8,510,000,000	3,314,012,248	(5,195,987,752)	39	8,926,450,000	7,818,896,088	1,107,553,912	88
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,751,993,000	7,956,986,508	(795,006,492)	91	10,683,142,000	10,006,904,556	676,237,444	94
1. Belanja Pegawai	3,898,420,000	3,520,297,898	(378,122,102)	90	3,690,668,000	3,472,236,149	218,431,851	94
2. Belanja Barang	4,853,573,000	4,436,688,610	(416,884,390)	91	5,349,391,000	4,992,395,246	356,995,754	93
3. Belanja Modal	0	0	0	0	1,643,083,000	1,542,273,161	100,809,839	94
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA 649682

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 2:04 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,751,993,000	7,956,986,508	(795,006,492)	91	10,683,142,000	10,006,904,556	676,237,444	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDE SUHENDRA
NIP. 197902062009121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:04 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	262,976,983	516,354,792	(253,377,809)	(49.07)
JUMLAH ASET LANCAR	262,976,983	516,354,792	(253,377,809)	(49.07)
ASET TETAP				
Tanah	10,118,066,000	10,118,066,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	12,593,400,877	12,756,545,248	(163,144,371)	(1.28)
Gedung dan Bangunan	5,482,469,374	5,361,406,003	121,063,371	2.26
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,675,000	18,675,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,861,385,340)	(12,446,291,811)	(415,093,529)	3.34
JUMLAH ASET TETAP	15,351,225,911	15,808,400,440	(457,174,529)	(2.89)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	746,600,000	349,800,000	396,800,000	113.44
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(746,600,000)	(349,800,000)	(396,800,000)	113.44
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	15,614,202,894	16,324,755,232	(710,552,338)	(4.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	22,339,198	23,718,727	(1,379,529)	(5.82)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22,339,198	23,718,727	(1,379,529)	(5.82)
JUMLAH KEWAJIBAN	22,339,198	23,718,727	(1,379,529)	(5.82)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,591,863,696	16,301,036,505	(709,172,809)	(4.35)
JUMLAH EKUITAS	15,591,863,696	16,301,036,505	(709,172,809)	(4.35)
JUMLAH EKUITAS	15,591,863,696	16,301,036,505	(709,172,809)	(4.35)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,614,202,894	16,324,755,232	(710,552,338)	(4.35)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDE SUHENDRA
NIP. 197902062009121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:05 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	101,044,581	0
0.0	117131	Bahan Baku	161,932,402	0
0.0	131111	Tanah	10,118,066,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,593,400,877	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,482,469,374	0
0.0	134113	Jaringan	18,675,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,890,893,440
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	959,215,190
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,276,710
0.0	162151	Software	746,600,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	746,600,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	22,339,198
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,956,986,508
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,314,012,248	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	203,401,000
0.0	391111	Ekuitas	0	16,301,036,505
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	45,341,842	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	3,312,861,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,248
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	411,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,076,003,940	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,047	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	93,770,500	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	30,692,000	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	46,460,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,869,814	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	67,133,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	176,434,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	30,115,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	122,093,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,738	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,026,830	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,358,816	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8,038,620	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	31,950,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,680,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:05 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	21,822,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,639,072,272	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	146,439,581	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,034,802,270	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	125,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	105,030,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	242,174,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	445,237,420	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	224,166,159	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	44,342,895	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	15,008,157	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,500,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	46,737,556	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,086,580,218	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	744,542,777	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	382,661,852	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44,632,677	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,270,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	271,856,659	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	139,425,944	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	550,084	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	192,603,450	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	4,402,658	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	240,239,992	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	22,529,709	0
JUMLAH			41,405,760,799	41,405,760,799

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDE SUHENDRA

NIP. 197902062009121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 2:02 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,312,861,000	7,812,534,054	(4,499,673,054)	(57.596)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,312,861,000	7,812,534,054	(4,499,673,054)	(57.596)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,312,861,000	7,812,534,054	(4,499,673,054)	(57.596)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,520,297,898	3,472,236,149	48,061,749	1.384
Beban Persediaan	432,843,442	880,523,050	(447,679,608)	(50.842)
Beban Barang dan Jasa	3,251,204,775	2,896,957,920	354,246,855	12.228
Beban Pemeliharaan	1,131,607,287	564,895,413	566,711,874	100.322
Beban Perjalanan Dinas	53,902,677	642,968,874	(589,066,197)	(91.617)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 2:02 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	411,832,687	797,631,543	(385,798,856)	(48.368)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,801,688,766	9,255,212,949	(453,524,183)	(4.9)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,488,827,766)	(1,442,678,895)	(4,046,148,871)	280.461
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(21,378,461)	4,362,034	(25,740,495)	(590.103)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,151,248	4,362,034	(3,210,786)	(73.608)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22,529,709	0	22,529,709	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(21,378,461)	4,362,034	(25,740,495)	(590.103)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(5,510,206,227)	(1,438,316,861)	(4,071,889,366)	283.101
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,510,206,227)	(1,438,316,861)	(4,071,889,366)	283.101

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDE SUHENDRA
NIP. 197902062009121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 2:03 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	16,301,036,505	21,911,600,963	(5,610,564,458)	(25.61)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,510,206,227)	(1,438,316,861)	(4,071,889,366)	283.1
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(45,341,842)	(9,402,500)	(35,939,342)	382.23
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(45,341,842)	(9,412,500)	(35,929,342)	381.72
LAIN-LAIN	0	10,000	(10,000)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,846,375,260	(4,162,845,097)	9,009,220,357	(216.42)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(709,172,809)	(5,610,564,458)	4,901,391,649	(87.36)
EKUITAS AKHIR	15,591,863,696	16,301,036,505	(709,172,809)	(4.35)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDE SUHENDRA

NIP. 197902062009121001